



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.
8 JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : *KP - DJKA 10 TAHUN 2023*

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tingkat Eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan acuan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan masing-masing unit organisasi tingkat Eselon II dan Eselon III Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dalam penyusunan dokumen SAKIP yang terdiri atas :

- a. Penyusunan rencana kinerja tahunan;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KEDUA : Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selanjutnya akan ditetapkan setiap tahunnya melalui dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam rangka penerapan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam dokumen SAKIP, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 pada tanggal 2 Juli 2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 JANUARI 2023

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19670608 199003 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Lampiran I

Nomor : KP. DJKA 10 TAHUN 2023

Tanggal : 11 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of Accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh
SP3 Kinerja pelayanan Transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP3 Persentase <i>On time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%
	IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%
	IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%
	IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	%
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Indeks RB Ditjen Perkeretaapian	Indeks
		Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti	%
		Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian	%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Persentase realisasi perjalanan kereta api berdasarkan GAPEKA	%
		Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	%
		Pemenuhan target angkutan Kereta Api	%
		Pemenuhan NSPK bidang LLAKA	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%
		Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Level

3. DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Prasarana Perkeretaapian	Rasio keterhubungan jalur kereta api antar wilayah	Rasio
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian	%
		Pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian	%
4	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Level

4. DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Fasilitas Sarana perkeretaapian Mendukung Konektivitas	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
2	Meningkatnya Kapasitas Sarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai
3	Meningkatnya Keandalan sarana perkeretaapian	Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%
		Pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	%
		Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil baik/temuan minor	%
		Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%
4	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level

5. DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Persentase penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%
		Pemenuhan sertifikasi kompetensi SDM regulator perkeretaapian	%
		Pemenuhan sertifikasi kompetensi SDM operator perkeretaapian	%
		Pemenuhan akreditasi lembaga perkeretaapian	%
		Persentase rekomendasi keamanan dan keselamatan yang menjadi kebijakan <i>stakeholder</i> /sudah ditindaklanjuti	%
		Pemenuhan NSPK bidang keselamatan dan keamanan perkeretaapian	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
2	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang keselamatan perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level

**C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA ESELON III/UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

1. BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%
4	Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%
5	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level

2. BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	%
2	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	%
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	%
4	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
5	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Level

3. BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi	%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Level

4. BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

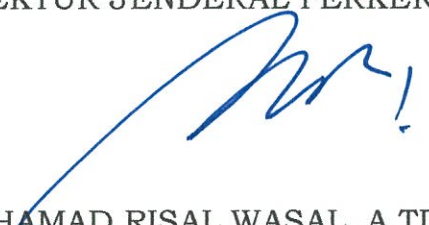
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan sarana dan prasarana transportasi Kereta Api Ringan di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumatera Selatan	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai
		Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan tepat waktu	%
2	Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase gangguan operasional kereta api ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti	%
		Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan	%
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Perkeretaapian Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai
		Tingkat maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level

5. BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rasio konektivitas wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Rasio
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
		Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
5	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Level

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Lampiran II

Nomor : KP. DJKA 10 TAHUN 2023

Tanggal : 11 JANUARI 2023

TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030. $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (<i>Km traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh. $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
IKP3 Persentase On time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$
IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$
IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$
IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang	%	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
Sesuai Dengan TQI I dan II		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan = Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan X 100%																									
IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
2	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. $\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu} = \frac{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian. $\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}} \times 100\%$
5	Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$
6	Indeks RB Ditjen Perkeretaapian	Indeks	Indeks RB diperoleh dari hasil penilaian mandiri sesuai Permenpan RB nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.
8	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.
9	Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
11	Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala likert 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.

2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jaringan yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan pada periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa <i>policy brief</i> dan/atau dokumen teknis persetujuan/penetapan trase (Keputusan Menteri, Surat Dirjen Perkeretaapian ke Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Surat Persetujuan Menteri). $ \begin{array}{l} \text{Persentase Rekomendasi} \\ \text{Kebijakan Bidang Jaringan} \\ \text{Perkeretaapian yang telah} \\ \text{Ditindaklanjuti} \end{array} = \frac{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan} \\ \text{Bidang Jaringan yang telah} \\ \text{Ditindaklanjuti Tahun 2020} \\ \text{s.d Tahun berjalan} \end{array} }{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Rekomendasi} \\ \text{Kebijakan yang ditargetkan} \\ \text{pada Periode 2020-2024} \\ \text{sesuai Dokumen Renstra} \end{array} } \times 100\% $

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
2	Persentase pencapaian kerjasama pembangunan infrastruktur perkeretaapian	%	Jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target kerjasama alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian periode 2020-2024. Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur sesuai Renstra, SP, OBC, FBC, Proposal Minat Badan Usaha. $\text{Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Pembangunan Infrastruktur yang Selesai/Ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d Tahun berjalan}}{\text{Target Kerjasama Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian Periode 2020-2024}} \times 100\%$
3	Persentase realisasi perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	%	Jumlah realisasi frekuensi perjalanan kereta api dibandingkan dengan jumlah program frekuensi perjalanan kereta api yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Perjalanan KA}}{\text{Jumlah Program Frekuensi Perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan}} \times 100\%$
4	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api tepat waktu	%	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
5	Pemenuhan target angkutan kereta api	%	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. $\text{Pemenuhan Target Angkutan KA} = \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$
6	Pemenuhan NSPK bidang LLAKA	%	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang LLAKA sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
			$\text{Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA} = \frac{\text{Jumlah NSPK yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang LLAKA}} \times 100\%$																									
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat LLAKA sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4). <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktoral LLAKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboar</i>d Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
9	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	%	Jumlah realisasi PNBP Direktorat LLAKA dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat LLAKA} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat LLAKA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Nilai	Nilai AKIP Direktorat LLAKA (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

3. DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Rasio keterhubungan jalur kereta api antar wilayah	Rasio	Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jalur kereta api s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jalur kereta api sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\text{Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung Jalur Kereta Api s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jalur Kereta Api sesuai RIPNAS 2030}}$
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II	%	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan. $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal	%	Jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi eksisting pada tahun berjalan dan rencana pembangunan/pengembangan s.d tahun 2024. $\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal} = \frac{\text{Jumlah Unit interlocking Fasilitas Operasi yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d tahun 2024}} \times 100\%$
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
	Direktorat Prasarana Perkeretaapian		<table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
5	Pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian	%	Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, bangunan, fasilitas operasi) yang sudah tersertifikasi kelaikan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis $\text{Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kelaikan} = \frac{\text{Jumlah Prasarana yang sudah Tersertifikasi Kelaikan dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai Renstra}} \times 100\%$																									
6	Pemenuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian	%	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan $\text{Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian}} \times 100\%$																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
8	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $ \begin{array}{c} \text{Persentase Realisasi} \\ \text{PNBP Direktorat} \\ \text{Prasarana} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{ \begin{array}{c} \text{Realisasi PNBP Direktorat} \\ \text{Prasarana pada Tahun} \\ \text{Berjalan} \end{array} }{ \begin{array}{c} \text{Target PNBP Direktorat} \\ \text{Prasarana pada Tahun} \\ \text{Berjalan} \end{array} } \times 100\% $

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

4. DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024. $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/ Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$
2	Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan perkeretaapian	%	Jumlah realisasi pengadaan/revitalisasi sarana penugasan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sarana

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
			penugasan untuk mendukung pelayanan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Pemenuhan Sarana Penugasan untuk Pelayanan Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Penugasan pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Penugasan periode 2020-2024 sesuai dokumen Renstra}}} \times 100\%$																									
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
4	Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	Penjumlahan antara pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara pada periode Renstra 2020-2024 dan pemenuhan target pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara pada tahun berjalan dengan bobot masing-masing 50%. $\frac{\text{Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{\frac{\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}} + \frac{\text{Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengadaan/Revitalisasi Sarana Milik Negara periode tahun 2020-2024 sesuai Renstra}}} \times 50\%$																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Unit Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Unit Pengoperasian Sarana Milik Negara pada Tahun Berjalan sesuai Renstra}}} \times 50\%$
5	Pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian	%	Jumlah sarana perkeretaapian yang tersertifikasi kelaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian eksisting pada tahun berjalan $\frac{\text{Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian (\%)}}{\frac{\text{Jumlah Sarana Perkeretaapian yang Tersertifikasi Kelaikan pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana Perkeretaapian Eksisting pada Tahun Berjalan}}} \times 100\%$
6	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil baik/temuan minor	%	Jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> dengan hasil baik/temuan minor dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>rampcheck</i> pada tahun berjalan $\frac{\text{Persentase Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Rampcheck dengan Hasil Baik/Temuan Minor}}{\frac{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck Hasil Baik/Temuan Minor pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang Dilakukan Rampcheck pada Tahun Berjalan}}} \times 100\%$
7	Pemenuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian	%	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan $\frac{\text{Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian}}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
9	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang sarana perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Sarana pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat Sarana pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

5. DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Persentase penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	Jumlah Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang memenuhi dan/atau meningkatkan kriteria penerapan SMKP s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian pada tahun berjalan. $ \begin{array}{l} \text{Persentase Penerapan} \\ \text{Sistem Manajemen} \\ \text{Keselamatan} \\ \text{Perkeretaapian} \end{array} = \frac{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Badan Usaha} \\ \text{Penyelenggaraan} \\ \text{Perkeretaapian yang} \\ \text{Memenuhi dan/atau} \\ \text{Meningkatkan Kriteria} \\ \text{Penerapan SMKP s.d Tahun} \\ \text{Berjalan} \end{array} }{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Badan Usaha} \\ \text{Penyelenggaraan} \\ \text{Perkeretaapian Pada Tahun} \\ \text{Berjalan} \end{array} } \times 100\% $
2	Pemenuhan sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian	%	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\frac{\text{Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sertifikat Kompetensi SDM Regulator yang sudah Diterbitkan dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator periode 2020-2024 sesuai Renstra}}} \times 100\%$
3	Pemenuhan sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian	%	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Sertifikat Kompetensi SDM Operator/Badan Usaha yang sudah Diterbitkan dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator/Badan Usaha periode 2020-2024 sesuai Renstra}}} \times 100\%$
4	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	Jumlah akreditasi lembaga pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan akreditasi lembaga pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Akreditasi Lembaga Pendidikan yang sudah Diterbitkan dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Akreditasi Lembaga Pendidikan Periode 2020-2024 sesuai Renstra}}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
5	Persentase rekomendasi keselamatan dan keamanan yang menjadi kebijakan <i>stakeholder</i> / sudah ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan <i>stakeholder</i>/ ditindaklanjuti/ diimplementasi dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang telah disusun/disampaikan kepada <i>stakeholder</i> perkeretaapian dari tahun 2020 s.d tahun berjalan. $\frac{\text{Persentase Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Menjadi Kebijakan stakeholder/Ditindaklanjuti Periode 2020 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Menjadi Kebijakan stakeholder/Ditindaklanjuti Periode 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang telah Disusun/ Disampaikan Periode 2020 s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$
6	Pemenuhan NSPK bidang keselamatan dan keamanan perkeretaapian	%	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan $\frac{\text{Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian}}{\text{Jumlah NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan}} \times 100\%$
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
			<table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.																									
9	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Keselamatan pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat Keselamatan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

C. TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA ESELON III/UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan di wilayah BTP dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA di wilayah BTP sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\text{Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Permeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BTP yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BTP yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BTP dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA di wilayah BTP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah BTP} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur di Wilayah BTP dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	Jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi di wilayah BTP yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi eksisting di wilayah BTP pada tahun berjalan dan rencana pembangunan/ pengembangan s.d tahun 2024. $\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi di wilayah BTP yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting di wilayah BTP pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2024}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang di wilayah BTP dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. $\text{Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah BTP} = \frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BTP} + \text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang di Wilayah BTP}}{2}$ Pemenuhan target angkutan penumpang di wilayah BTP diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang di Wilayah BTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang di wilayah BTP diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api di wilayah BTP pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang di Wilayah BTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Barang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi perjalanan kereta api perintis pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target/program perjalanan kereta api perintis pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah BTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Perjalanan KA Perintis pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target/Program Perjalanan KA perintis pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	%	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BTP pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP pada tahun berjalan $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP} = 100\% - \left[\frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \right]$
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			• Capaian <i>Output</i> sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
8	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self</i>

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			<i>assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

2. BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	%	Jumlah realisasi sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian kelaikan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian sarana perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis $\text{Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Pengujian dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian Sarana Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai Renstra}} \times 100\%$
2	Pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	%	Jumlah realisasi SDM perkeretaapian yang dilakukan pengujian kompetensi dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian SDM perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis $\text{Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi SDM Perkeretaapian yang Dilakukan Pengujian dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian SDM Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai Renstra}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
3	Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	%	Jumlah realisasi prasarana perkeretaapian (Unit, Km) yang dilakukan pengujian kelaikan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian prasarana perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis $\frac{\text{Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Prasarana Perkeretaapian (Unit, Km) yang Dilakukan Pengujian dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai Renstra}}} \times 100\%$																									
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
5	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen;																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; - Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: - Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; 80% - 90% : Kategori Baik; 60% - 80% : Kategori Cukup; 50% - 60% : Kategori Kurang; - Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
7	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

3. BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%	Jumlah sarana perkeretaapian milik negara dengan kondisi siap operasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana perkeretaapian milik negara $\text{Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara yang Siap Operasi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Perkeretaapian Milik Negara dengan Kondisi Siap Operasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara}} \times 100\%$																									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
3	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			• 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.
4	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	Jumlah realisasi PNBP Balai Perawatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Balai Perawatan Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Perawatan Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Perawatan Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
5	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
6	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Level	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

4. BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumatera Selatan	%	Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api ringan Sumatera Selatan tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
			$\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Ringan Sumatera Selatan}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA Ringan Sumatera Selatan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Ringan Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}} \times 100\%$																									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4). <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
3	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan tepat waktu	%	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun berjalan. $\frac{\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan tepat waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}}} \times 100\%$																									
4	Persentase gangguan operasional kereta api ringan Sumatera Selatan	%	Jumlah realisasi/penyelesaian tindak lanjut terhadap gangguan operasional yang terjadi pada tahun berjalan baik terkait operasi, sarana dan prasarana perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah kejadian gangguan operasional yang terjadi pada tahun berjalan																									

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
	yang Selesai Ditindaklanjuti		$\frac{\text{Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Terjadi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
5	Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan	%	Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan pada kereta api ringan Sumatera Selatan (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun berjalan. $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan} = 100\% - \left[\frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \right]$
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian <i>Output</i> sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang
7	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	Jumlah realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

5. BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1	Rasio konektivitas wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Rasio	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan di wilayah BPKA Sulsel dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA di wilayah BPKA Sulsel sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. $\text{Rasio Konektivitas Wilayah BPKA Sulsel} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BPKA Sulsel yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BPKA Sulsel yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BPKA Sulsel dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan. $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah BPKA Sulsel} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur di Wilayah BPKA Sulsel dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA di Wilayah BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Jumlah unit interlocking fasilitas operasi di wilayah BPKA Sulsel yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan dan rencana pembangunan/pengembangan s.d tahun 2024.

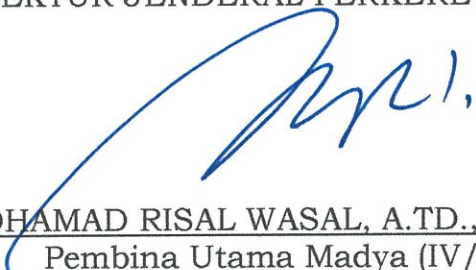
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
			$\frac{\text{Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah BPKA Sulsel (\%)}}{\frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi di wilayah BPKA Sulsel yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting di wilayah BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2024}}} \times 100\%$
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang di wilayah BPKA Sulsel dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah BPKA Sulsel periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. $\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah BPKA Sulsel}}{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BPKA Sulsel}} + \frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang di Wilayah BPKA Sulsel}}{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BPKA Sulsel}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan penumpang di wilayah BPKA Sulsel diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api di wilayah BPKA Sulsel pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api di wilayah BPKA Sulsel periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang di Wilayah BPKA Sulsel}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BPKA Sulsel dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BPKA Sulsel Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang di wilayah BPKA Sulsel diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api di wilayah BPKA Sulsel pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
			barang kereta api di wilayah BPKA Sulsel periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang di Wilayah BPKA Sulsel} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BPKA Sulsel dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BPKA Sulsel Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$																									
5	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan tepat waktu	%	Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api penumpang dan barang di wilayah BPKA Sulsel tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan KA di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan. $\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan KA di Wilayah BPKA Sulsel Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kedatangan dan keberangkatan KA Penumpang dan Barang di Wilayah BPKA Sulsel Tepat Waktu pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang di Wilayah BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPKA Sulsel sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4) <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
7	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah BPKA Sulsel diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BPKA Sulsel pada tahun berjalan. $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BPKA Sulsel} = 100\% - \left[\frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \right]$
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BPKA Sulsel merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian <i>Output</i> sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% - 90% : Kategori Baik; • 60% - 80% : Kategori Cukup; • 50% - 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
9	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	Jumlah realisasi PNBP BPKA Sulsel dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP BPKA Sulsel} = \frac{\text{Realisasi PNBP BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP BPKA Sulsel pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
10	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	Nilai AKIP BPKA Sulsel (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
11	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Level	Tingkat Maturitas SPIP BPKA Sulsel (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005